

Kepemimpinan Demokratis dan Supervisi Akademik dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Studi Kasus pada Guru Pendidikan Pancasila di Sekolah Terpencil

Abd. Wahab Dana¹, Muhammad Sukri², Erni B. Tipuon³, Nizham⁴, Yurni Rahman⁵,
Lia Nurhayati⁶

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Gorontalo^{1,2,3,4,5,6}

email korespondensi: abdwahab030794@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<i>Sejarah Artikel:</i> Diterima (Maret) (2026) Disetujui (April) (2026) Dipublikasikan (April) (2026) Keywords: Kepemimpinan demokratis, supervisi akademik, implmentasi kurikulum, guru	<i>Kepemimpinan kepala sekolah dan supervisi akademik merupakan faktor penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka, terutama pada sekolah terpencil yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, buku ajar, dan guru bidang studi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi gaya kepemimpinan kepala sekolah, menganalisis mekanisme supervisi akademik, dan mendeskripsikan kontribusi keduanya terhadap kinerja guru Pendidikan Pancasila di SMPN SATAP Tatarandang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipan, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model spiral Creswell dan Poth. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, member checking, dan reflektivitas peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah menerapkan kepemimpinan demokratis melalui pelibatan guru dalam pengambilan keputusan dan pembinaan yang suportif. Supervisi akademik dijalankan sebagai pendampingan, meskipun terhambat keterbatasan jaringan internet dan sumber belajar. Temuan kritis menunjukkan bahwa musyawarah yang terlalu dominan berpotensi melemahkan ketegasan kepala sekolah. Dengan demikian, efektivitas kepemimpinan demokratis di sekolah terpencil memerlukan keseimbangan antara partisipasi, dukungan profesional, dan ketegasan kepemimpinan.</i> Abstract <i>Principal leadership and academic supervision are essential factors in implementing the Merdeka Curriculum, particularly in remote schools facing limited infrastructure, textbooks, and subject-specialist teachers. This study aims to identify the principal's leadership style, analyze the mechanism of academic supervision, and describe how both contribute to the performance of a Pancasila Education teacher at SMPN SATAP Tatarandang, Banggai Islands Regency. A qualitative single-case study design was employed. Data were collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and document study, and were analyzed using Creswell and Poth's data analysis spiral. Data trustworthiness was strengthened through source triangulation, technique</i>

triangulation, member checking, and researcher reflexivity. The findings indicate that democratic leadership was practiced through teacher involvement in decision-making and supportive mentoring. Academic supervision functioned as developmental assistance, although it was constrained by limited internet access and learning resources. A critical finding reveals that an overly dominant deliberative orientation may weaken leadership firmness. Effective democratic leadership in remote schools therefore requires a balance between participation, professional support, and firmness.

Pendahuluan

Mutu pendidikan pada jenjang dasar dan menengah pertama tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana belajar, tetapi juga oleh kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam menggerakkan guru dan mengelola perubahan pembelajaran. Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka, kepala sekolah dituntut berperan sebagai pemimpin pembelajaran, fasilitator pengembangan profesional guru, dan pengawas akademik yang mampu memastikan proses belajar berlangsung adaptif, kontekstual, serta berpihak pada kebutuhan peserta didik. Tuntutan tersebut menjadi semakin kompleks pada satuan pendidikan terpencil yang menghadapi keterbatasan jaringan internet, buku ajar, dan tenaga pendidik sesuai bidang keahlian.

Di antara berbagai pendekatan kepemimpinan, kepemimpinan demokratis memiliki relevansi kuat bagi sekolah dengan sumber daya terbatas karena menempatkan guru sebagai mitra dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan demokratis tercermin melalui musyawarah, keterbukaan komunikasi, penghargaan terhadap pendapat guru, dan pembagian tanggung jawab secara kolaboratif. Pada level sekolah, pola demokratis beririsan dengan kepemimpinan transformatif karena sama-sama menekankan penguatan visi bersama, pelibatan anggota organisasi, dan pemberdayaan guru (Devi & Subiyantoro, 2021). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan demokratis dapat meningkatkan motivasi, rasa memiliki, dan kinerja guru karena guru tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang ikut menentukan arah program sekolah.

Selain kepemimpinan, supervisi akademik menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas pembelajaran. Supervisi akademik tidak semestinya dipahami semata-mata sebagai mekanisme kontrol administratif, melainkan sebagai proses pembinaan profesional yang

membantu guru merefleksikan, memperbaiki, dan mengembangkan praktik pembelajaran (Ayuni et al., 2024). Dalam Kurikulum Merdeka, supervisi akademik idealnya mengarah pada pendekatan coaching yang dialogis, reflektif, dan berkelanjutan, sehingga guru mampu mengenali kebutuhan pengembangan dirinya serta menyusun strategi perbaikan pembelajaran secara lebih mandiri (Yulindar et al., 2025).

Kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya mudah diwujudkan di SMPN SATAP Tatarandang, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Sekolah ini beroperasi dalam kondisi keterbatasan berlapis: akses internet tidak stabil, buku teks belum tersedia secara merata untuk seluruh jenjang, dan sebagian guru harus mengajar mata pelajaran di luar bidang keahliannya. Kondisi serupa juga ditemukan dalam kajian tentang implementasi Kurikulum Merdeka di daerah 3T, yakni keterbatasan sarana, kesiapan guru yang belum merata, serta kebutuhan pendampingan yang lebih kontekstual (Erroyani, 2022). Kondisi ini mempersempit ruang guru untuk mengakses referensi pembelajaran, mengikuti pelatihan daring, menyusun perangkat ajar secara optimal, serta melakukan refleksi profesional secara berkelanjutan. Dalam situasi demikian, kepemimpinan kepala sekolah dan supervisi akademik menjadi semakin strategis karena keduanya berfungsi sebagai penopang utama implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat satuan pendidikan.

Penelitian terdahulu telah membahas kepemimpinan demokratis kepala sekolah dan supervisi akademik, tetapi sebagian besar masih mengkaji keduanya secara terpisah atau pada konteks sekolah dengan dukungan sumber daya yang relatif lebih baik. (Robani & Mustofa, 2024) meneliti kepemimpinan demokratis dalam peningkatan kinerja guru di sekolah menengah, sedangkan (Sukinem Sukinem & Tutut Sholihah, 2022) membahas supervisi akademik pada daerah 3T tanpa mengaitkannya secara langsung dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Sementara itu, (Saiman et al., 2025) mengkaji supervisi berbasis coaching dalam Kurikulum Merdeka, tetapi belum menempatkan ketiadaan infrastruktur digital sebagai konteks utama. Celah penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana kepemimpinan demokratis dan supervisi akademik bekerja secara simultan dalam satu ekosistem sekolah terpencil yang menghadapi keterbatasan sumber daya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMPN SATAP

Tatarandang; (2) menganalisis mekanisme pelaksanaan supervisi akademik; dan (3) mendeskripsikan kontribusi kepemimpinan demokratis dan supervisi akademik terhadap kinerja guru Pendidikan Pancasila yang mengajar lintas mata pelajaran. Fokus pada guru Pendidikan Pancasila dipilih karena guru tersebut mengalami langsung tekanan struktural berupa pengampuan mata pelajaran di luar bidang keilmuannya, sehingga menjadi representasi penting dari tantangan guru di sekolah terpencil.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Desain ini dipilih karena penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam praktik kepemimpinan demokratis dan supervisi akademik dalam konteks tertentu, yaitu satu sekolah satu atap yang sedang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di tengah keterbatasan sumber daya. Studi kasus tunggal dinilai relevan karena fenomena yang dikaji memiliki batas konteks yang jelas, meliputi satu satuan pendidikan, satu periode pengamatan, dan aktor utama yang terlibat langsung dalam praktik kepemimpinan dan supervisi (Creswell & Poth, 2018).

Lokasi penelitian adalah SMPN SATAP Tatarandang, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Pengumpulan data dilakukan pada 28 Mei sampai 3 Juni 2026 melalui kunjungan langsung ke sekolah. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena sekolah ini merepresentasikan kondisi satuan pendidikan terpencil yang menghadapi keterbatasan jaringan internet, keterbatasan buku teks, serta kekurangan guru bidang studi.

Partisipan penelitian terdiri atas kepala sekolah dan satu guru Pendidikan Pancasila. Keduanya dipilih secara purposif karena memiliki keterlibatan langsung dalam fenomena yang dikaji. Kepala sekolah berperan sebagai pengambil keputusan dan pelaksana supervisi akademik, sedangkan guru Pendidikan Pancasila merupakan guru yang menerima supervisi dan sekaligus mengajar lintas mata pelajaran. Pemilihan jumlah partisipan yang terbatas disesuaikan dengan karakter studi kasus tunggal yang menekankan kedalaman data, bukan jumlah informan. Namun, untuk menjaga kekayaan data, wawancara dilengkapi dengan observasi dan studi dokumen.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada kepala sekolah dan guru Pendidikan Pancasila dengan durasi 30 sampai 60 menit pada setiap sesi. Wawancara diarahkan pada pengalaman kepemimpinan, praktik supervisi, kendala implementasi Kurikulum Merdeka, dan dukungan terhadap guru. Kedua, observasi nonpartisipan

dilakukan untuk mengamati interaksi kepala sekolah dan guru, proses supervisi di kelas, serta dinamika rapat sekolah. Ketiga, studi dokumen dilakukan terhadap jadwal supervisi, catatan hasil supervisi, perangkat pembelajaran, dan dokumen pendukung terkait ketersediaan sarana pembelajaran.

Analisis data mengacu pada model spiral Creswell dan Poth (2018). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap: (1) mengorganisasi transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen; (2) membaca keseluruhan data secara berulang dan menuliskan memo analitik; (3) melakukan pengodean awal terhadap unit data yang berkaitan dengan partisipasi guru, komunikasi kepala sekolah, praktik supervisi, hambatan sarana, dan respons guru; (4) mengelompokkan kode ke dalam kategori; (5) menyusun tema utama, yaitu kepemimpinan demokratis, supervisi sebagai pembinaan, adaptasi terhadap keterbatasan, dan dilema ketegasan kepemimpinan; serta (6) menyajikan hasil dalam bentuk narasi tematik dan tabel triangulasi.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, member checking, dan reflektivitas peneliti. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala sekolah dan guru Pendidikan Pancasila. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali interpretasi utama kepada partisipan agar tidak terjadi penyimpangan makna. Selain itu, peneliti menyadari posisinya sebagai bagian dari komunitas sekolah, sehingga reflektivitas dilakukan dengan mencatat potensi bias, menjaga jarak analitik, dan membedakan antara pengalaman pribadi dengan data yang diperoleh dari partisipan.

Aspek etika penelitian diperhatikan melalui permohonan izin kepada pihak sekolah, penjelasan tujuan penelitian kepada partisipan, serta persetujuan partisipan untuk mengikuti wawancara dan observasi. Data yang bersifat personal dijaga kerahasiaannya, sedangkan penyebutan nama sekolah dilakukan karena konteks lokasi menjadi bagian penting dari kasus yang dikaji dan telah memperoleh persetujuan dari pihak terkait.

Hasil Penelitian

a. Pola Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah

Pola kepemimpinan kepala sekolah di SMPN SATAP Tatarandang menunjukkan kecenderungan demokratis yang tercermin melalui pelibatan guru dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah menyatakan bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS)

selalu melibatkan masukan guru karena guru dinilai paling memahami kebutuhan riil pembelajaran dan kondisi kelas. Pernyataan ini diperkuat oleh guru Pendidikan Pancasila yang mengaku dilibatkan dalam rapat penyusunan anggaran tahunan, termasuk ketika program yang dibahas tidak selalu berkaitan langsung dengan tugas utamanya.

Keterlibatan guru tidak hanya berlangsung dalam forum resmi, tetapi juga melalui komunikasi informal. Observasi menunjukkan bahwa kepala sekolah dan guru sering berdiskusi di ruang tamu sekolah pada jam istirahat untuk membahas persoalan operasional, seperti administrasi ujian, kebutuhan pembelajaran, dan teknis pelaksanaan program sekolah. Pola komunikasi ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan demokratis tidak hanya hadir dalam rapat formal, tetapi juga dalam interaksi keseharian yang memungkinkan guru menyampaikan pendapat secara lebih terbuka.

Salah satu contoh keterbukaan kepala sekolah terlihat ketika guru Pendidikan Pancasila menyampaikan keberatan terkait pengelolaan anggaran panitia ujian akhir sekolah. Guru menilai bahwa mekanisme pengelolaan dana kurang transparan karena dana belum diserahkan secara penuh kepada bendahara panitia sejak awal. Keberatan tersebut disampaikan dalam forum rapat dan diterima dengan baik oleh kepala sekolah. Temuan ini menunjukkan adanya ruang koreksi dari guru terhadap keputusan sekolah, yang merupakan ciri penting kepemimpinan demokratis.

Dimensi partisipatif juga tampak pada tindakan kepala sekolah yang turun langsung mengisi kekosongan kelas ketika terdapat guru yang terlambat hadir akibat kendala transportasi. Tindakan ini memperlihatkan bahwa kepala sekolah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga terlibat langsung dalam menjaga keberlangsungan proses pembelajaran. Dalam konteks sekolah terpencil dengan jumlah guru terbatas, tindakan seperti ini memiliki makna penting karena menunjukkan tanggung jawab kolektif terhadap layanan pendidikan.

b. Mekanisme Pelaksanaan Supervisi Akademik

Supervisi akademik di SMPN SATAP Tatarandang lebih banyak dipahami sebagai proses pembinaan daripada sekadar evaluasi formal. Kepala sekolah menjelaskan bahwa supervisi dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan guru dan diarahkan untuk memberikan penguatan. Ia menegaskan bahwa masukan tidak diberikan dalam bentuk teguran langsung, tetapi melalui pendekatan yang lebih suportif agar guru tidak merasa disalahkan.

Observasi terhadap supervisi guru Pendidikan Pancasila di kelas 8 memperlihatkan bahwa kepala sekolah duduk di bagian belakang kelas sambil mengisi instrumen penilaian selama pembelajaran berlangsung. Setelah pembelajaran selesai, kepala sekolah memberikan pembinaan pascasupervisi. Masukan yang diberikan bersifat teknis, antara lain anjuran memanfaatkan proyektor sebagai media pembelajaran, menggunakan pertanyaan pemantik pada awal pembelajaran, dan menutup pembelajaran dengan refleksi. Pada saat yang sama, kepala sekolah juga memberikan apresiasi terhadap kelengkapan administrasi pembelajaran yang telah disiapkan guru.

Kepala sekolah menunjukkan fleksibilitas ketika guru Pendidikan Pancasila mengampu Bahasa Indonesia yang bukan bidang keilmuannya. Kepala sekolah menyatakan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi tetap mendorong guru untuk memperdalam metode dan pendekatan pembelajaran sesuai kapasitas yang dimiliki. Guru Pendidikan Pancasila mengakui bahwa ia berusaha mengikuti saran tersebut, tetapi terkendala oleh keterbatasan referensi dan kemampuan teknologi informasi. Suasana pembinaan berlangsung santai dan tidak menegangkan, sehingga guru dapat menerima masukan secara terbuka.

Meskipun supervisi akademik diarahkan pada pembinaan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala struktural. Mekanisme supervisi yang mulai terhubung dengan platform Ruang GTK belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi sekolah yang memiliki akses internet sangat terbatas. Guru Pendidikan Pancasila menyampaikan bahwa untuk mengakses referensi pembelajaran atau kebutuhan administratif daring, ia sering harus mencari jaringan ke desa lain. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan digitalisasi administrasi pendidikan dan realitas infrastruktur sekolah terpencil.

c. Dukungan terhadap Guru yang Mengajar Lintas Mata Pelajaran

Keterbatasan guru bidang studi menyebabkan beberapa guru mengajar mata pelajaran di luar latar belakang keilmuannya. Kepala sekolah mendistribusikan beban mengajar melalui dua pertimbangan utama, yaitu pemenuhan jam mengajar dan tingkat kesibukan guru. Guru Pendidikan Pancasila yang mendapat tugas mengajar Bahasa Indonesia sempat menolak karena merasa tidak memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai, tetapi akhirnya menerima setelah memahami bahwa guru lain juga menghadapi kondisi serupa.

Terjadinya kesenjangan kompetensi sekolah menerapkan strategi berbagi praktik baik antarguru. Kepala sekolah menjelaskan bahwa ketika ada pelatihan di tingkat kecamatan atau kabupaten, sekolah mengutus guru tertentu, biasanya wakil kepala sekolah bidang kurikulum, untuk mengikuti kegiatan tersebut. Setelah kembali, guru yang mengikuti pelatihan membagikan informasi dan praktik kepada rekan sejawat. Guru Pendidikan Pancasila menggunakan istilah yang sama, yaitu berbagi praktik baik, ketika menjelaskan cara ia memahami materi dan strategi pembelajaran Bahasa Indonesia.

Dari sisi sarana observasi menunjukkan bahwa dukungan pembelajaran masih belum memadai. Buku teks Kurikulum Merdeka untuk kelas 7 tersedia lengkap, tetapi buku kelas 8 hanya berjumlah 15 eksemplar untuk 23 siswa, sedangkan buku kelas 9 belum tersedia dan masih direncanakan melalui anggaran BOSP tahap berikutnya. Sekolah telah mengalokasikan sebagian dana BOSP untuk pembelian buku secara bertahap dan merencanakan pengadaan internet satelit sebagai solusi jangka pendek. Namun, bantuan perangkat digital seperti panel interaktif, Chromebook, dan laptop belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan koneksi internet.

d. Dilema Ketegasan dalam Kepemimpinan Demokratis

Selain dampak positif penelitian ini menemukan sisi kritis dari kepemimpinan demokratis. Guru Pendidikan Pancasila menilai bahwa kepala sekolah kadang terlalu mengedepankan musyawarah sehingga kurang tegas dalam menindak guru yang kurang disiplin. Menurut guru, kondisi ini dapat membuat sebagian guru merasa terlalu bebas dan tidak mendapat teguran yang memadai ketika tidak menjalankan tugas secara optimal.

Temuan ini tentunya diperkuat melalui observasi rapat sekolah yang membahas keluhan siswa terhadap guru yang jarang masuk kelas. Dalam rapat tersebut, kepala sekolah tidak memberikan teguran langsung, tetapi menyampaikan imbauan agar guru lebih rajin masuk kelas. Konvergensi antara wawancara dan observasi ini menunjukkan bahwa kecenderungan menghindari teguran langsung bukan sekadar persepsi subjektif guru, melainkan bagian dari pola kepemimpinan yang tampak dalam praktik.

e. Dampak Kepemimpinan dan Supervisi terhadap Kinerja Guru Pendidikan Pancasila

Kepemimpinan demokratis dan supervisi akademik memberikan dampak terhadap kinerja guru Pendidikan Pancasila, terutama pada aspek motivasi, kesiapan administratif, dan kemampuan

bertahan dalam kondisi terbatas. Apresiasi kepala sekolah terhadap perangkat pembelajaran mendorong guru mempertahankan kelengkapan administrasi. Fleksibilitas kepala sekolah terhadap pengampunan mata pelajaran di luar bidang keilmuan juga mengurangi tekanan psikologis guru, sehingga guru tetap menjalankan tugas pembelajaran.

Namun dampak tersebut belum sepenuhnya nampak dalam bentuk perubahan pedagogik yang terukur. Keterbatasan referensi, rendahnya akses internet, dan minimnya pelatihan formal membuat peningkatan kinerja lebih terlihat pada level adaptasi dan pemeliharaan motivasi daripada inovasi pembelajaran yang substansial. Dengan demikian, kepemimpinan dan supervisi dapat membantu guru bertahan dan bekerja secara lebih terarah, tetapi belum cukup untuk menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran yang optimal tanpa dukungan infrastruktur dan pengembangan profesional yang lebih sistematis.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa kepemimpinan demokratis menjadi pendekatan yang adaptif bagi sekolah terpencil karena mampu menciptakan ruang partisipasi di tengah keterbatasan sumber daya. Pelibatan guru dalam penyusunan program sekolah, pengelolaan anggaran, dan penyelesaian persoalan operasional menunjukkan bahwa kepala sekolah tidak memonopoli keputusan, tetapi membangun proses kepemimpinan yang lebih kolektif. Pola ini sejalan dengan pandangan bahwa kepemimpinan demokratis dapat meningkatkan rasa memiliki guru terhadap program sekolah dan memperkuat komitmen kerja (Erroyani, 2022). Dalam konteks SMPN SATAP Tatarandang, ruang partisipasi menjadi semakin penting karena guru menghadapi beban kerja yang lebih kompleks akibat keterbatasan tenaga pendidik.

Temuan ini juga memperluas hasil penelitian (Maqbool et al., 2024) yang menunjukkan hubungan positif antara kepemimpinan demokratis dan kinerja guru. Perbedaanannya, penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan demokratis tidak hanya bekerja melalui forum formal, tetapi juga melalui interaksi informal sehari-hari. Pada sekolah terpencil yang tidak memiliki dukungan komunikasi digital memadai, percakapan langsung antarguru dan kepala sekolah justru menjadi medium penting untuk koordinasi, refleksi, dan penyelesaian masalah. Dengan demikian, kepemimpinan demokratis dalam konteks ini tidak dapat dilepaskan dari kedekatan relasional antara kepala sekolah dan guru.

Pada aspek supervisi akademik, pendekatan kepala sekolah yang menekankan penguatan dan

pembinaan menunjukkan pergeseran dari supervisi yang bersifat kontrol menuju supervisi yang bersifat pendampingan. Hal ini sejalan dengan gagasan supervisi akademik humanis, dialogis, dan berorientasi pada perbaikan praktik pembelajaran (Robani & Mustofa, 2024). Supervisi yang dilakukan kepala sekolah tidak berhenti pada pengamatan kelas, tetapi dilanjutkan dengan masukan teknis tentang penggunaan media, pertanyaan pemantik, dan refleksi pembelajaran. Pola ini sejalan dengan supervisi berbasis coaching pada Kurikulum Merdeka yang menekankan dialog, refleksi diri, kesepakatan rencana tindak lanjut, dan dukungan berkelanjutan kepada guru (Yulidar et al., 2025). Dengan demikian, supervisi akademik dapat menjadi sarana pengembangan profesional, meskipun dilakukan dalam kondisi sederhana.

penelitian ini juga menemukan adanya ketegangan antara tuntutan supervisi digital dan kondisi infrastruktur sekolah terpencil. Penggunaan platform Ruang GTK menuntut akses internet, sementara guru harus mencari jaringan ke desa lain untuk memenuhi kebutuhan administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan belum sepenuhnya mempertimbangkan variasi kemampuan infrastruktur antarsekolah. Dalam konteks ini, supervisi akademik yang efektif harus bersifat kontekstual, tidak hanya mengikuti instrumen standar, tetapi juga menyesuaikan dengan realitas sekolah, sebagaimana ditegaskan oleh Sanoto et al. (2021).

Strategi berbagi praktik baik antarguru menjadi mekanisme adaptif untuk menutup keterbatasan pelatihan formal. Pola ini menunjukkan embrio komunitas belajar profesional di tingkat sekolah, meskipun belum terstruktur secara formal. Guru yang mengikuti pelatihan bertindak sebagai penghubung pengetahuan bagi guru lain. Strategi ini penting karena guru Pendidikan Pancasila yang mengajar Bahasa Indonesia membutuhkan dukungan keilmuan dan pedagogik tambahan. Temuan ini sejalan dengan kajian tentang guru di sekolah rural yang menunjukkan bahwa komunitas guru, visi bersama, dan dukungan kepala sekolah berpengaruh terhadap kapasitas guru dalam memimpin dan mengadaptasi kurikulum (Wang et al., 2022). Meskipun demikian, strategi berbagi praktik baik belum dapat menggantikan kebutuhan akan pelatihan sistematis, pendampingan berkelanjutan, dan ketersediaan sumber belajar yang memadai.

Temuan kritis penelitian ini terletak pada dilema kepemimpinan demokratis. Di satu sisi, musyawarah dan keterbukaan komunikasi memperkuat partisipasi guru. Di sisi lain, orientasi musyawarah yang terlalu dominan dapat melemahkan ketegasan kepala sekolah dalam menegakkan disiplin kerja. Observasi rapat yang menunjukkan kepala sekolah hanya memberikan imbauan kepada

guru yang jarang masuk kelas memperlihatkan bahwa kepemimpinan demokratis berisiko bergeser menjadi permisif apabila tidak diimbangi dengan keberanian mengambil keputusan tegas. Temuan ini penting karena sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak menonjolkan sisi positif kepemimpinan demokratis, sementara dimensi risikonya jarang dibahas secara mendalam. Dalam konteks kinerja guru, kajian lintas gaya kepemimpinan menunjukkan bahwa dukungan, partisipasi, dan arahan kepemimpinan perlu tetap diarahkan pada keberlanjutan kinerja akademik, bukan hanya pada terciptanya suasana kerja yang nyaman (Maqbool et al., 2024).

Dengan demikian kepemimpinan demokratis yang efektif di sekolah terpencil tidak cukup hanya mengandalkan partisipasi dan musyawarah. Kepala sekolah perlu menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan akuntabilitas. Guru perlu diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi standar disiplin, kehadiran, dan tanggung jawab profesional tetap harus ditegakkan. Keseimbangan tersebut menjadi syarat penting agar kepemimpinan demokratis tidak hanya menciptakan iklim kerja yang nyaman, tetapi juga menghasilkan kinerja guru yang lebih bertanggung jawab dan berdampak pada kualitas pembelajaran.

Secara menyeluruh penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan demokratis dan supervisi akademik di SMPN SATAP Tatarandang beroperasi sebagai mekanisme adaptif yang dimediasi oleh keterbatasan sumber daya. Dukungan kepala sekolah membantu guru mempertahankan motivasi dan kesiapan administratif, tetapi belum cukup untuk menghasilkan perubahan pedagogik yang substansial tanpa dukungan infrastruktur, pelatihan, dan sumber belajar yang memadai. Temuan ini memberikan implikasi bahwa kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah terpencil perlu disertai strategi afirmatif, terutama dalam penyediaan akses internet, buku ajar, dan pengembangan profesional guru lintas mata pelajaran.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah SMPN SATAP Tatarandang menerapkan kepemimpinan demokratis melalui pelibatan guru dalam pengambilan keputusan, keterbukaan komunikasi, penerimaan terhadap masukan, dan keterlibatan langsung dalam menjaga keberlangsungan pembelajaran. Kepemimpinan demokratis tersebut menciptakan iklim kerja yang partisipatif dan mendukung guru dalam menghadapi keterbatasan sumber daya.

Supervisi akademik dilaksanakan sebagai proses pembinaan yang menekankan penguatan, dialog, dan masukan teknis terhadap praktik pembelajaran. Meskipun demikian, pelaksanaan supervisi masih menghadapi kendala serius karena keterbatasan akses internet, kekurangan buku ajar, dan belum optimalnya pemanfaatan perangkat digital. Dukungan terhadap guru Pendidikan Pancasila yang mengajar lintas mata pelajaran lebih banyak hadir dalam bentuk fleksibilitas tuntutan, motivasi, dan berbagi praktik baik antarguru daripada solusi struktural yang langsung menyelesaikan persoalan kekurangan guru bidang studi.

Temuan dalam penelitian ini karena adanya dilema dalam kepemimpinan demokratis. Musyawarah dan keterbukaan memang memperkuat partisipasi guru, tetapi apabila terlalu dominan tanpa ketegasan, keduanya dapat melemahkan disiplin kerja. Oleh karena itu, efektivitas kepemimpinan demokratis di sekolah terpencil membutuhkan keseimbangan antara partisipasi, dukungan profesional, dan ketegasan dalam menegakkan tanggung jawab guru.

Sebagai studi kasus tunggal, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik ke seluruh sekolah terpencil. Namun, temuan ini dapat menjadi rujukan kontekstual bagi sekolah dengan karakteristik serupa, khususnya sekolah satu atap di daerah 3T yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, sumber belajar, dan guru bidang studi. Penelitian lanjutan disarankan melibatkan lebih banyak sekolah, lebih banyak informan, dan periode pengamatan yang lebih panjang agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik kepemimpinan dan supervisi akademik dalam implementasi Kurikulum Merdeka di daerah terpencil.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, L., Andari, A. A., Hidayah, N., & Zulkarnain, I. (2023). Implementasi kepemimpinan demokratis kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Bandar Lampung. *UNISAN JOURNAL: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 2(2), 750-758. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/view/1348>
- Ayuni, R., Mutohar, P. M., & Maunah, B. (2024). Urgensi supervisi akademik sebagai fundamen profesionalisme guru. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 24(1), 35-46. <https://journal.um-surabaya.ac.id/didaktis/article/view/21071>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Devi, A. D., & Subiyantoro, S. (2021). Implementation of Democratic Leadership Style and Transformational Head of Madrasah in Improving The Quality. *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 14–26. <https://doi.org/10.31538/ndh.v6i1.1162>
- Erroyani, S. A. (2022). Manajemen Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar. *Kalam Cendekia*:

- Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 10(2), 460. <https://doi.org/10.20961/jkc.v10i2.65772>
- Maqbool, S., Zafeer, H. M. I., Maqbool, S., Zeng, P., Draissi, Z., & Javed, S. (2024). Stance of numerous leadership styles and their effect on teaching to sustain academic performance at the high school level. *Heliyon*, 10(16), e36438. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36438>
- Robani, R., & Mustofa, T. A. (2024). Implementasi Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Kinerja Guru di SMA Negeri 1 Wonogiri. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(3), 1930–1938. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i3.1196>
- Saiman, R., -, R., & Kasman, R. (2025). Ketercapaian Kurikulum Merdeka dan Kesiapan Guru di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3-T). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 137–152. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v10i1.5595>
- Sukinem Sukinem, & Tutut Sholihah. (2022). Manajemen Humas Dalam Membangun Citra (Image Building) di SD IT Al Manar Pangkalan Bun. *JISPENDIORA : Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 1(2), 33–41. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v1i2.32>
- Wang, X., Chen, J., Yue, W., Zhang, Y., & Xu, F. (2022). Curriculum leadership of rural teachers: Status quo, influencing factors and improvement mechanism-based on a large-scale survey of rural teachers in China. *Frontiers in Psychology*, 13, 813782. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.813782>
- Yulidar, Aswad, F. H., & Badrun, M. (2025). Implementasi supervisi akademik berbasis coaching dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada Kurikulum Merdeka. *Manajemen Pendidikan*, 20(1), 187-196. <https://doi.org/10.23917/jmp.v20i1.11296>
- Yus, A., Simanullang, R. F., Hutagaol, R., Ritonga, M., & Wijaya, A. (2024). Gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah dan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Darma Agung*, 32(3), 144-150. <https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i3.4407>